



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

2025

Jl. Wolter Monginsidi,
Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Gedung E Lantai 1 Kode Pos 75511, Telp. 0541-661832,
email: dinas.pmd.kukar@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp: 0541-661832,663880 Fax: 6669032 email: bapemaskukar@gmail.com

TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P – 40 /DPMD/1.3/900.1.3/04/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

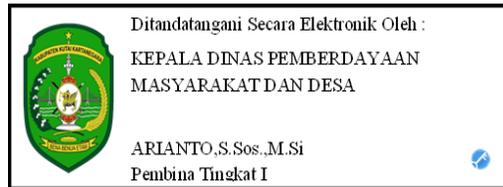
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib Administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara lengkap, transparan dan akuntabilitas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD, Tanggal 05 April 2007, tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010;

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 682/SK-BUP/HK/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dengan susunan nama – nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 Tahun sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, sebagai suatu tim yang solid, berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dengan sebaik – baiknya serta penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas masing – masing yang telah ditetapkan secara terpadu dan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya;
- Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2024



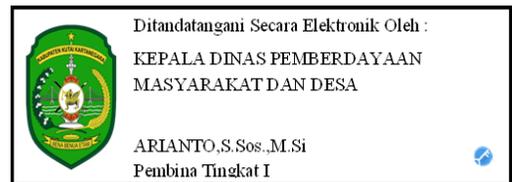
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan).
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Masing – masing yang bersangkutan.
8. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tentang : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024
Nomor : P- 40 /DPMD/1.3/900.1.3/04/2024
Tanggal : 01 April 2024

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Perencana Ahli Muda (Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si)
- VI. Anggota :
 1. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (Poino, S.IP, M.Si)
 2. Kepala Bidang Kerjasama Desa (Dedy Surianto.SE)
 3. Kepala Bidang Penataan Desa (Atih Hayati, AP)
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa (Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos,M.Si)
 5. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Kartika Sari, A.Ma. Pd)
 6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset (Julpiansyah, S.Sos, M.Si)
 7. Fungsional PSM (Heriansyah, SH)
 8. Fungsional PSM (Ahmad Irji'i, SE, M.Si)
 9. Fungsional PSM (Hendra Madan, SE)
 10. Fungsional PSM (Hj. Anita Hefiana, S.Sos, M.Si)
 11. Fungsional PSM (Samsul Dafik, S.Sos)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2025 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-4 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021 - 2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun

berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Tenggarong, Juli 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2023	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD :	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	37
1. Tingkat Pelayanan DINAS PMD	37
2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	38
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	41
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara.....	42
5. Formulasi isu-isu penting :.....	43
2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III	123
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	123
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	123
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	132
BAB IV	136
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	136
4.1 Rencana Program Kerja dan Kegiatan	136
BAB V	164

P E N U T U P	164
a. Catatan penting	164
b. Kaidah pelaksanaan	165
c. Tindak Lanjut	166

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Dan perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang - undang tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja

Tahunan dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD Kutai Kartanegara) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;
2. RENJA OPD merupakan acuan atau pedoman bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DINAS PMD Tahun 2025

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
12. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
14. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang BPD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan RENJA DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 (tahun berjalan) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2025

BAB V PENUTUP : Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2023****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD :**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS PMD Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang sudah terinput pada Aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%
 - b) Program Penataan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
 - c) Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
 - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 99,0%.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian Kinerja Program Sebesar 99,0%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,0%.
2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja sebesar 85%, dimana indikator sub kegiatan adalah : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan Target 37 Dokumen, namun capaian kinerja yang terealisasi adalah hanya 21 Dokumen, ada 16 Dokumen yang belum teralisasi yaitu pembentukan Klinik Desa di 16 Kecamatan yang belum terbentuk dikarenakan terkendala belum terbitnya Peraturan Bupati tentang Klinik Konsultasi Desa Idaman.
3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :

Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja secara signifikan OPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian perlunya peningkatan SDM, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan

perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan Penyusunan Program Kerja OPD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Tabel T.C-29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85	88	80	88	110,00	82	258,00	3,04
2	13	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	100	100	100,00	100	300,00	3,00
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	9	6	6	100,00	4	19	0,40
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	3	3	100,00	5	8	0,00
2	13	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</i>	60	12	12	12	100,00	12	36	0,60
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13910	2588	2782	2682	96,41	1582	6852	0,49
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	14	14	100,00	12	38	0,63

2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100,00	5	7	1,40
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	0	0,00	5	5	1,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20	20	91	455,00	20	131	1,31
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	222	22	210	277	131,90	50	349	1,57
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	17	17	17	100,00	17	51	0,51
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	4	8	8	100,00	8	20	6,67
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	3	3	100,00	3	8	8,00

2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	0	39	53	135,90	4	57	57,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	12	12	100,00	12	36	36,00
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930	1	186	249	133,87	186	436	0,47
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	0	2	2	100,00	50	52	4,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135	33	194	207	106,70	30	270	2,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	17	20	100	500,00	20	137	1,37

2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	20	2	2	100,00	2	24	24,00
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	3	3	100,00	3	8	8,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	12	12	100,00	12	36	36,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	17	20	65	325,00	20	102	1,02
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95	5	26	4	15,38	5	14	0,15
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	0,00	3	3	0,00

2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	415	33	70	149	212,86	20	202	0,49
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	1	1	100,00	0	2	2,00
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	1	1	0,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86	2	5,18	5	96,53	10	17	0,44
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	193	19	31	15	48,39	27	61	0,32
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19	6	9	13	144,44	3	22	1,16
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	0	10	10	100,00	2	12	1,20

RENCANA KERJA | 2025

2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	50	10	10	19	190,00	10	39	0,78
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21	6	3	9	300,00	3	18	0,86
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50	10	3	3	100,00	2630	2643	52,86
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	100	100	10	10,00	100	220	2,20
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	193	64	106	13	12,26	57	134	0,69
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	1	9	10	111,11	12	23	4,60
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20	2	2	2	100,00	6	10	0,50
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	2	3	3	100,00	5	10	1,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	95	50	70	67	95,71	95	212	2,23

						Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	50	10	10	5	50,00	30	45	0,90
2	13	04	2.01		<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</i>	193	193	193	180	93,26	193	566	2,93
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40	7	8	8	100,00	8	23	0,58
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30	13	5	3	60,00	8	24	0,80
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	140	28	1	1	100,00	1	30	0,21
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150	23	50	50	100,00	40	113	0,75
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	193	193	104	116	111,54	32	341	1,77
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75	15	14	14	100,00	14	43	0,57

2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	193	2	198	198	100,00	82	282	1,46
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	270	13	23	23	100,00	23	59	0,22
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5	1	20	20	100,00	42	63	12,60
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2	6	37	21	56,76	43	70	35,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	125	15	54	20	37,04	54	89	0,71
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	640	220	1257	1257	100,00	230	1707	2,67
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75	11	34	39	114,71	15	65	0,87
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	20	20	20	100,00	20	60	60,00

RENCANA KERJA | 2025

2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3	1	0	0	0,00	1	2	0,67
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10	2	2	2	100,00	18	22	2,20
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
						Persentase Posyandu Aktif	70,35	49	51,51	92	178,61	70	211	3,00
2	#	05	2.01		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</i>	3826	4666	613	5	0,82	823	5494	1,44

2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	1	2	2	100,00	1	4	0,80
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	2	19	19	100,00	18	39	7,80
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2590 orang	37949	7630	10426	136,64	7775	56150	#VALUE!

2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300	44	26	26	100,00	1496	1566	5,22
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15	3	4	4	100,00	3	10	0,67
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	2	8	8	100,00	3	13	4,33
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	3	4	4	100,00	1	8	0,53

2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	1	0	0	0,00	1	2	0,40
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25	3	8	9	112,50	8	20	0,80

Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat signifikansi, capaian dan kesesuaian realisasi antara capaian kinerja Program, Kegiatan dengan Sub Kegiatan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Kesesuaian Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		KETERANGAN
				Kinerja	%		Anggaran (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80	88	110,00	21.764.310.173	20.167.045.179	92,66	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	100,00	597.212.400	593.539.424	99,38	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100,00	397.212.400	393.610.724	99,09	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00	200.000.000	199.928.700	99,96	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12	12	100,00	12.373.050.850	11.144.946.376	90,07	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3250	2682	82,52	12.083.510.082	10.863.800.876	89,91	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	14	100,00	289.540.768	281.145.500	97,10	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00	46.860.000	46.860.000	100,00	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0,00	46.860.000	46.860.000	100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	91	455,00	749.026.000	744.883.306	99,45	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	277	131,90	749.026.000	744.883.306	99,45	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17	17	100,00	1.718.722.600	1.681.823.950	97,85	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	100,00	503.781.000	503.024.450	99,85	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100,00	50.000.000	49.925.000	99,85	

9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39	53	135,90	300.000.000	296.723.300	98,91	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	475.000.000	442.615.500	93,18	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186	249	133,87	281.521.600	281.115.700	99,86	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	100,00	108.420.000	108.420.000	100,00	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100	100	100,00	3.708.261.000	3.624.186.400	97,73	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	194	207	106,70	3.708.261.000	3.624.186.400	97,73	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	20	100	500,00	1.400.652.323	1.365.021.655	97,46	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100,00	191.112.847	187.113.054	97,91	

15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00	229.455.000	200.967.100	87,58	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	980.084.476	976.941.501	99,68	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	65	325,00	1.170.525.000	965.784.068	82,51	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	4	15,38	718.565.000	542.075.698	75,44	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70	149	212,86	51.960.000	51.960.000	100,00	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	100,00	400.000.000	371.748.370	92,94	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	5,18	5	96,53	1.312.052.000	964.644.577	73,52	

	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	31	15	48,39	1.312.052.000	964.644.577	73,52	
20	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9	13	144,44	97.052.000	70.043.400	72,17	
21	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	10	100,00	700.000.000	549.761.970	78,54	
22	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10	19	190,00	100.000.000	55.116.500	55,12	
23	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	3	9	300,00	50.000.000	43.726.000	87,45	
24	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3	3	100,00	365.000.000	245.996.707	67,40	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	10	10,00	1.608.948.000	1.318.971.977	81,98	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	106	13	12,26	1.608.948.000	1.318.971.977	81,98	
25	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9	10	111,11	858.948.000	582.451.477	67,81	

RENCANA KERJA | 2025

26	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	2	100,00	100.000.000	98.225.500	98,23	
27	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	3	100,00	650.000.000	638.295.000	98,20	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	70	67	95,71	26.741.035.828	25.484.353.507	95,30	
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	5	50,00				
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</i>	193	180	93,26	26.741.035.828	25.484.353.507	95,30	
28	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8	8	100,00	100.000.000	85.802.000	85,80	
29	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	3	60,00	100.000.000	54.071.268	54,07	
30	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	1	100,00	120.000.000	117.561.500	97,97	
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50	50	100,00	3.567.266.880	3.456.069.081	96,88	

32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104	116	111,54	464.888.948	441.591.484	94,99	
33	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14	14	100,00	100.000.000	72.743.800	72,74	
34	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198	198	100,00	1.954.800.000	1.911.371.165	97,78	
35	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23	23	100,00	100.000.000	99.379.400	99,38	
36	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	20	20	100,00	170.000.000	130.347.500	76,68	
37	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	37	21	56,76	12.463.880.000	12.107.612.113	97,14	
38	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54	20	37,04	1.623.000.000	1.569.226.946	96,69	
39	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1257	1257	100,00	5.177.200.000	4.898.195.484	94,61	

RENCANA KERJA | 2025

40	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	34	39	114,71	300.000.000	172.362.818	57,45	
41	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20	20	100,00	100.000.000	54.986.000	54,99	
42	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1		0,00	0	0	0,00	
43	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	2	100,00	400.000.000	313.032.948	78,26	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100,00	30.716.903.680	29.589.545.644	96,33	
		Persentase Posyandu Aktif	51,51	92	178,61				

	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</i>	613	5	0,82	30.716.903.680	29.589.545.644	96,33	
44	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2	2	100,00	347.047.000	306.299.800	88,26	
45	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19	9	47,37	1.680.000.000	1.578.110.952	93,94	

46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630	10426	136,64	4.899.751.400	4.759.183.152	97,13	
47	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26	26	100,00	11.054.593.280	10.789.366.551	97,60	
48	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	4	100,00	750.000.000	726.713.300	96,90	
49	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8	8	100,00	2.493.901.000	2.286.777.005	91,69	
50	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4	4	100,00	805.913.000	740.620.000	91,90	

51	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2		0,00	0		0,00	
52	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8	9	112,50	8.685.698.000	8.402.474.884	96,74	
JUMLAH						82.143.249.681	77.524.560.884	94,38	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran DINAS PMD yang tertuang dalam RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 maka Analisis kinerja pelayanan DINAS PMD sesuai dengan RENSTRA DINAS PMD tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2023 berdasarkan target dan capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penataan Desa, Program Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat, dapat dilihat analisis kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	10	10	10	0	0	100	100	0	0	0	Target sudah tercapai
2			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	10	10	10	14,3	14,3	22,45	35,13	14,3	14,3	14,3	Capaian melebihi target
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			77	80	82	84	85	87,7	88	82	84	85	Capaian melebihi target
4	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa			1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	2	5	10,36	25,91	38,86	Capaian sesuai target
5	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai target
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik			50	70	80	90	95	50	67	80	90	95	Capaian sesuai target

7	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa			10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	Capaian kinerja di bawah target
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	70,35	Capaian kinerja sesuai target
9	Persentase Posyandu Aktif			45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	49	92	57,79	64,07	100	Capaian kinerja sesuai target

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**1. TINGKAT PELAYANAN DINAS PMD**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERBUP Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Kemudian pada RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 dilakukan review berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
- 2) Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa
- 3) Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa
- 4) Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik
- 5) Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa
- 6) Prosentase Posyandu Aktif
- 7) Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

Secara struktur organisasi, saat ini DINAS PMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:

- 1) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Penataan Desa;

d. Bidang Kerjasama Desa;

e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan

h. UPTD.

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan

kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DINAS PMD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Belum optimalnya penataan desa	
		2. Masih perlu adanya penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, sarana prasarana desa	
		3. Adanya data sarana dan prasarana desa yang belum termutakhirkan	
		4. Ada beberapa desa yang belum akses air minum dan sanitasi yang layak	
		5. 9 Desa yang belum adanya kajian terkait program terang kampungku	
	Belum optimalnya Kerjasama Antar Desa	1. Belum teridentifikasinya potensi wilayah yang ditetapkan sebagai kerjasama kawasan pembangunan perdesaan	
		2. Belum terfasilitasinya kerjasama desa berdasarkan potensi desa	
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	1. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	
		2. Belum dievaluasinya produk Hukum Desa	
		3. Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman	
			4. Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
			5. Belum tepatnya unit usaha BUMDesa dengan potensi yang ada di desa
			6. Belum terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
			7. Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas
		Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan,	1. Belum terfasilitasinya kegiatan masyarakat hukum adat
2. Perlu kontinuitas database LKD dan LAD			

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Desa	3.	Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
	4.	Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
	5.	Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
	6.	Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
	7.	Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
	8.	Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

- 1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DINAS PMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi ;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DINAS PMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturanya;
- 3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
- 4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.

3. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Visi Kutai Kartanegara adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran makna dari MISI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

MISI

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, DINAS PMD mempunyai

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dimana DPMD memiliki peranan terhadap tercapainya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Keterkaitan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak sebagaimana Visi dan Misi yang menjadi arah kebijakan Dinas PMD terletak pada :

- a. Misi 1 : Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
- b. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya serta, Misi
- c. Misi 3 : Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga DINAS PMD memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Disamping beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Visi dan Misi Bupati. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- a) Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku ;
- b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
- d) Dinas PMD memiliki peranan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu dengan tema : “ Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan “.

5. FORMULASI ISU-ISU PENTING :

- Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Perda/Perbup/SK Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa;

- Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- Dinas PMD selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
- Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini mengalami regenerasi. Peralihan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh habis masa kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.

2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Bahwa berdasarkan hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan capaian Target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun capaian target Kinerja program tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					RAPBD						Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84 Nilai	17.073.530.833	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84 Nilai	19.405.789.448	2.332.258.615	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.000.000.000	550.000.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	300.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	(50.000.000)	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	(50.000.000)	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	(50.000.000)	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	50.000.000	
6						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	

7						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	250.000.000	
8						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.215.280.193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.105.338.976	(109.941.217)	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/Bulan	13.855.338.976	(134.941.217)	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	-	

RENCANA KERJA 2025

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	-	
12						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	48.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	105.000.000	57.000.000	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	(48.000.000)	
14						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
15						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	

16						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	318.000.000		
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	168.000.000	68.000.000	Belum ada pengadaan pakaian dinas selama 10 tahun
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau, Jakarta, Yogyakarta, Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKI Jakarta, Yogyakarta, Malang, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	150.000.000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 Persen	574.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 Persen	574.000.000		
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	-	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	-	

21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	50.000.000	-	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	150.000.000	-	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	-	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	282.800.168	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.050.000.000		
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	232.800.168	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.000.000.000	1.767.199.832	Pengadaan kendaraan dinas Roda 4 Eselon 2 = 1 Unit dan Eselon 3 = 5 Unit (Sekretaris dan 4 Kepala Bidang)
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	322 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	-	Pengadaan Filling Cabinet, CCTV, Scanner, Printer, PC, Laptop, AC Split 1 PK

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	1.053.450.472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	1.053.450.472		
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	-	
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Sangasanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	-	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.450.472	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.450.472	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	200.000.000		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.000.000	-	

RENCANA KERJA 2025

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit (1 Unit Roda 4, 23 Unit Roda 2, 2 Unit Sewa Mobil)	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	50.000.000	-	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	157 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	50.000.000	-	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	-	(50.000.000)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor DPMD terdiri dari : Penyekatan dan Penambahan Interior = 5 Ruangan
34						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	50.000.000	50.000.000	
	PENATAAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	25,91 Persen	470.000.000	PENATAAN DESA		Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	25,91 Persen	1.850.000.000		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	27 Desa	470.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	27 Desa	1.850.000.000		
35	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	7 Desa	120.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	7 Desa	150.000.000	30.000.000	

36	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec. Tabang, Muara Muntai, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Samboja Barat	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	100.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Loleng, Sukabumi (Kota Bangun), Saliki (Muara Badak), Prangat Baru (Marangkayu), Muara Pedohon (Tabang), Lebah Ulaq (Muara Kaman), Selering (Sebulu), Buana Jaya (Tgr Seberang), Muara Leka (Muara Muntai), Lebak Mantan (Muara Wis), Sepakat (Loa Kulu), Genting Tanah (Kembang Janggut), Purwajaya (Loa Janan)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	1.300.000.000	1.200.000.000	Pendampingan Penyusunan Tata Kelola Wilayah Desa dan Penyusunan Dokumen Perdes Tata Wilayah Desa
37	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1 Desa di 18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	18 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa Karyajaya, Kutai Lama, Bakungan, Kedang Ipil, Rebaq Rinding, Sungai Bawang, Semangko, Muara Pedohon, Lamin Pulut, Hambau, Bunga Jadi, Lekaq Kidau, Bhuana Jaya, Sebelimbangan, Lung Anai, Lebaq Cilong, Rapak Lambur, Batuah	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	18 Desa	150.000.000	50.000.000	

38	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Salo Cella, Jonggon Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Tani Bhakti (Samboja), Sido mulyo(Tabang), Tani Bhakti(Loa Janan), Sumber Sari (Kota Bangun), Sumber Sari(Sebulu), Sid omulyo(Anggana), Sumber Sari(Loa Kulu), Sungai Bawang(Muara Badak)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	100.000.000	50.000.000	
39	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Jembayan, Loa Duri Ulu, Sungai Payang, Kembang Janggut, Muara Badak Ulu, Bangun Rejo, Sepatin	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	7 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Genting Tanah (Kec. Kembang Janggut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	150.000.000	50.000.000	Penyediaan mebelair terdiri dari : 1. Kursi Kerja dan Meja Kerja 2 x 5 unit/desa x 138 = 1380 Unit 2. Meja Rapat 1 Unit/Desa =138 Unit 3. Kursi Rapat 13 Unit /desa x 138 = 1794 Unit
	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	KAB KUTAI KARTANEGARA	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100 Persen	350.000.000	PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100 Persen	500.000.000		
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	57 Desa	350.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	57 Desa	500.000.000		
40	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan Kecamatan Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Ponoragan,	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Muara Badak: Desa Saliki, Salo Palai, Muara Badak Ulu, Muara Badak Ilir, Tanjung Limau, Tanah Datar, Badak Baru, Suka Damai, Gas Alam Badak I, Batu-Batu, Badak Mekar, Salo Cella, Sungai Bawang, Kec. Marangkayu: Desa Perangat Baru, Bunga Putih, Semangko	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7 Dokumen	250.000.000	150.000.000	

		Rempanga, Margahayu, Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kecamatan Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kecamatan Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir.					.Prangat Baru,Prangat Selatan, Kersik,Santan Ulu,Santan Tengah,Santan Ilir,Makarti,Sebutal,					
41	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan Kecamatan Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber,	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tgr Seberang:Desa Separi,Kerta Buana,Bukit Pariaman,Buana Jaya, Suka Maju, Kec. Loa Kulu:Desa Loh Sumber,Jembayan Tengah,Sumber Sari,Ponoragan, Sepakat,Rempanga, Kec. Sebulu:Desa Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari,Kec. Muara Kaman:Panca	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	(100.000.000)	

		<p>Ponoragan, Rempanga, Margahayu, Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kecamatan Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kecamatan Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir</p>					<p>Jaya, Sido Mukti, Cipari Makmur, Bunga Jadi, Kec. Tgr Seberang: Desa Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya Tanjung Batu, Loa Lepu, Kec. Marangkayu: Des a Prangat Baru, Prangat Selatan, Makarti, Bunga Putih, Sambera Baru</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

42	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Loa Kulu:Desa Jembayan Tengah,Loh Sumber,Sumber Sari,Ponoragan,Sepakat,RempangaKec. Sebulu:Desa Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari Kec. Muara Kaman:Desa Panca Jaya,Sidomukti,Cipari Makmur,Bunga Jadi Kec.Tgr Seberang:Desa Embalut,Bangun Rejo,Manunggal Jaya,Karang Tunggal,Bukit Raya,Tanjung Batu,Loa Lepu,Kertabuana,Buana Jaya,Bukit Pariaman,Suka Maju,Separi Kec.Marangkayu:Desa Semangko,Sebuntal,Santan Ulu, Perangat Baru,Makarti, Perangat Selatan, Bunga Putih, Sambera Baru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Loa Kulu:Jembayan Tengah,Loh Sumber,Sumber Sari,Ponoragan, Sepakat,Rempanga Kec.Sebulu: Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari Kec. Muara Kaman:Panca Jaya,Sidomukti, Cipari Makmur,Bunga Jadi Kec.Tgr Seberang:Embalut,Bangun Rejo,Manunggal Jaya,Karang Tunggal,Bukit Raya,Tanjung Batu,Loa Lepu,Kertabuana,Buana Jaya,Bukit Pariaman,Suka Maju,Separi Kec.Marangkayu:Semangko,Sebuntal,Santan Ulu, Perangat Baru,Makarti,Perangat Selatan, Bunga Putih, Sambera Baru Kec.Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Dokumen	250.000.000	100.000.000	
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	KAB KUTAI KARTANEGERA	<i>Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik</i>	90 Persen	9.456.085.828	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		<i>Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik</i>	90 Persen	24.226.693.870		

			<i>Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</i>	<i>10 Persen</i>				<i>Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</i>	<i>10 Persen</i>			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193 Desa	9.456.085.828	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193 Desa	24.226.693.870		
43	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen	-	(100.000.000)	
44	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	110 Dokumen	100.000.000	-	
45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	250.000.000	130.000.000	
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	38 Dokumen	2.716.085.828	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	389 Dokumen	7.885.720.910	5.169.635.082	Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat dan BPD
47	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tenggarong	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	108 Orang	100.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tenggarong	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	72 Orang	200.000.000	100.000.000	

48	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kec. Tabang: Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala, Teluk Bingkai, Kahala Ilir, Tubuhan Kec. Kota Bangun Darat: Sedulang, Kota Bangun III, Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng, Pela, Sebelimbingan Kec. Loa Janan: Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau, Muara Badak Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kec. Tabang: Muara Salung Kec. Kenohan: Kahala, Teluk Bingkai, Kahala Ilir, Tubuhan Kec. Kota Bangun Darat: Sedulang, Kota Bangun III, Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng, Pela, Sebelimbingan Kec. Loa Janan: Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau, Muara Badak Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	-	(100.000.000)	
49	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198 Dokumen	1.100.000.000	1.000.000.000	

50	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec.Muara Muntai:Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pulau Harapan,Jantur,Ma.Muntai Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq;Kec.Loa Kulu:Sepakat, Jongkang,Sumber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Ponoragan,Rempanga,Jonggon Jaya,Lung Anai;Kec.Loa Janan:Batuah, Bakungan,Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajaya ,Tani Bhakti,Loa Duri Ilir;Kec. Anggana:Ma.Pantuan,Tani Baru,Sungai Mariam,Sidomulyo,Handil Terusan;Kec. Ma.Badak:Ma.Badak Ulu,Gas Alam Badak I,Badak Baru,Saliki,Salo Palai,Tanah Datar,Batu-Batu;Kec.Tgr: Bendang Raya;Kec.Sebulu:Sebulu Ilir,Giri Agung,Mekar Jaya,Sebulu Ulu,Sebulu Modern,Selerng,Tj.Harapan,Sumber Sari,Manunggal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	111 Laporan	5.000.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec.Muara Muntai:Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pulau Harapan,Jantur, Ma.Muntai Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq;Kec.Loa Kulu:Sepakat, Jongkang,Sumber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Ponoragan,Rempanga,Jonggon Jaya,Lung Anai;Kec.Loa Janan:Batuah, Bakungan,Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajaya, Tani Bhakti,Loa Duri Ilir;Kec. Anggana :Ma.Pantuan, Tani Baru,Sungai Mariam,Sidomulyo,Handil Terusan;Kec. Ma.Badak:Ma.Badak Ulu,Gas Alam Badak I,Badak Baru,Saliki,Salo Palai,Tanah Datar,Batu-Batu;Kec.Tgr:Be ndang Raya;Kec.Sebulu:Sebulu Ilir,Giri Agung,Mekar Jaya,Sebulu Ulu,Sebulu Modern,Selerng,Tj.Harapan,Sumber Sari,Manunggal Daya;Kec.Kota Bangun:Sumber Sari,Sebelimbangan,Kota Bangun II,Benua	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	111 Laporan	-	(5.000.000.000)
----	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	-----------------

	<p>Daya;Kec.Kot a Bangun:Sumb er Sari,Sebelimbi ngan,Kota Bangun II,Benua Baru,Sedul ng,Loleng,Pela, Kota Bangun III;Kec.Kenoh an:Lamin Telihan,Kahal a Iilir,Tubuhan,T eluk Bingkai,Kahal a;Kec.Kb.Jang gut:Loa Sakoh,Hamba u,Kelekat,Lon g Beleh Modang;Kec. Ma.Kaman:Te ratak,Sedul ng,Panca Jaya,Cipari Makmur,Ma.K aman Ulu,Sabintulun g;Kec.Tabang: Long Lalang,Umaq Dian,Baru,Um aq Tukung,Sidom ulyo,Ma.Tiq,M a.Salung,Ma. Kebq,Ma. Belinau,Ritan Baru,Bila Talang,Tukun g Ritan;Kec.Sa mboja:Bukit Raya,Beringin Agung,Tani Bhakti;Kec. Tgr Sbr:Manungg al Jaya,Bangun Rejo,Tj.Batu,B huana</p>						<p>Baru,Sedulang,L oleng,Pela,Kota Bangun III;Kec.Kenohan: Lamin Telihan,Kahala Iilir,Tubuhan,Tel uk Bingkai,Kahala; Kec.Kb.Janggut: Loa Sakoh,Hambau, Kelekat,Long Beleh Modang;Kec.Ma. Kaman:Teratak, Sedulang,Panca Jaya,Cipari Makmur,Ma.Ka man Ulu,Sabintulung; Kec.Tabang:Lon g Lalang,Umaq Dian,Baru,Umaq Tukung,Sidomul yo,Ma.Tiq,Ma.Sa lung,Ma.Kebq,M a. Belinau,Ritan Baru,Bila Talang,Tukung Ritan;Kec.Samb oja:Bukit Raya,Beringin Agung,Tani Bhakti;Kec. Tgr Sbr:Manunggal Jaya,Bangun Rejo,Tj.Batu,Bhu ana Jaya,Embalut,Bu kit raya,Kertabuana .Separi,Bukit Pariaman,Perjiw a,Tik Dalam,Loa Lepu,Suka Maju,Loa Pari;Kec.Marang Kayu:Kersik,Pra ngat Baru,Sambara Baru,Perangat Selatan,Santan Ulu,Bunga Putih,Semangko</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

RENCANA KERJA 2025

51	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Bila Talang, Kampung Baru,Umaq Bekuay,Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng,Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Bila Talang, Kampung Baru,Umaq Bekuay,Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala ,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang, Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng,Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Laporan	100.000.000	-	
52	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	16 Dokumen	250.000.000	150.000.000	
53	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	12.258.472.960	11.958.472.960	Pembayaran: 1. Honorarium, Operasional, dan Asuransi GTPDKI = 6 Orang x 12 Bulan 2. Honorarium, Operasional, dan Asuransi Pendekar Idaman terdiri dari : TAPM = 4 Orang, PDK = 40 Orang, PLDK = 237 Orang, Staf Administrasi = 2 Orang

54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	193 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	250.000.000	150.000.000	
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Semua Kecamatan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	120.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tenggarong	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	83 Orang	300.000.000	180.000.000	
56	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tabang (semua desa)	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	19 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tenggarong, Kec. Tabang (semua desa)	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	19 Desa	500.000.000	400.000.000	
57	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kec. Kembang Janggut, Anggana, Loa Kulu, Loa Janan, Kota Bangun, Tenggarong, Samboja Barat, Sebulu, Muara Badak, Muara Kaman, Marngayu, Muara Muntai, Kota Bangun, Tenggara, Seberang, Sambaja, Muara Wis, Tabang, Kenohan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	19 Laporan	382.500.000	282.500.000	
58	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	250.000.000	150.000.000	

59	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	387 Dokumen	400.000.000	300.000.000	
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KAB KUTAI KARTANEGARA	<i>Persentase Posyandu Aktif</i>	64,07 Persen	1.205.000.000	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		<i>Persentase Posyandu Aktif</i>	64,07 Persen	19.346.924.500		
			<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</i>	100 Persen				<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</i>	100 Persen			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	824 Lembaga	1.205.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	824 Lembaga	19.346.924.500		
60	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kec. Tabang: Ds. Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Salung, Muara Kebaq, Muara Tuboq	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kec. Tabang: Ds. Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Kebaq, Muara Tuboq	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	150.000.000	50.000.000	

61	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kecamatan, Manunggal Jaya, Perangat Selatan, Beloro, Kersik, Anggana, Sidomulyo, Tubuhan, Suka Damai, Muara Aloh, Genting Tanah, Loa Lepu, Tani Bhakti, Ritan Baru, Tanah Datar, Rapak Lambur, Kedang Ipil, Beringin Agung, Hambau, Pela, Lebak Mantan, Karya Jaya, Bendang Raya, Muara Muntai Ilir, Loh Sumber, Sepakat, Muara Kaman Ilir, Mekar Jaya, Bakungan, Sumber Sari, Separi, Loa Duri Ilir, Kahala, Sidomukti, Muara Wis	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kec. Loa Janan, Kembang Janggut, Kenohan, Anggana, Loa Kulu, Muara Wis, Tenggaraong, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Marangkayu, Muara Badak, Samboja, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai, Tabang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39 Dokumen	690.000.000	540.000.000	Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------

62	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4422 Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4430 Lembaga	3.050.453.000	2.925.453.000	Pembayaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan RT sebanyak 9534 orang pengurus RT (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
63	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Manunggal Jaya, Perangat Selatan, Beloro, Kersik, Anggana, Sidomulyo, Tubuhan, Suka Damai, Muara Aloh, Genting Tanah, Loa Lepu, Tani Bhakti, Ritan Baru, Tanah Datar, Rapak Lambur, Kedang Ipil, Beringin Agung, Hambau, Pela, Lebak Mantan, Karya Jaya, Bendang Raya, Muara Muntai Ilir, Loh Sumber, Sepakat, Muara Kaman Ilir, Mekar Jaya, Bakungan, Sumber Sari, Separi, Loa Duri Ilir,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	47 Unit	120.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kec. Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Muara Badak, Marangkayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	540 Unit	11.013.111.000	10.893.111.000	1. Pembangunan Gedung Posyandu dibagi dalam 3 Zona yang terdiri dari = 12 Bangunan Di Zona Hulu (7 Kecamatan), 20 Di Zona Tengah, (6 Kecamatan), 15 Zona Pesisir (7 Kecamatan) 2. Pengadaan Kursi 47 x 5 Unit = 235 unit Pengadaan Meja 47 x 5 = 235 Unit Lemari Geser 47 x 1 = 47 Unit

		Kahala, Sidomukti, Muara Wis										
64	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Muara Badak : Suka Damai,Badak Mekar, Ds. Tanjung Limau Kec. Sebulu : Senoni, Tanjung Harapan Kec. Muara Kaman : Liang Buaya,Rantau Hempang, Ds. Tunjungan,Le baho Ulaq Kec. Kota Bangun Darat: Kota Bangun I,Kota Bangun II,Wonosari, Sangkuliman Kec. Muara Muntai: Jantur Selatan,Batuq ,Rebaq Rinding Kec. Loa Janan: Loa Janan Ilir	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Sebulu Modern,Badak Mekar,Lebaho Ulaq,Jantur Selatan,Beringin Agung,Loa Duri Ilir,Sangkuliman, Manunggal Jaya,Sidomulyo, Kota Bangun I.Kembang Janggut, Santan Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	51 Dokumen	650.000.000	480.000.000	
65	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten, Provinsi, Nasional, Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong ,Prov. Kalimantan Timur, Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	643.360.500	523.360.500	
66	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten, Provinsi, Semua Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	300.000.000	200.000.000	

67	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000	125.000.000	
68	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	245.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Dokumen	2.650.000.000	2.405.000.000	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat, Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV TP. PKK Kabupaten
TOTAL					28.554.616.661					65.329.407.818	36.774.791.157	

2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan leading sektor yang mengkoordinir aspirasi tersebut.

2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaimana tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten serta Renstra OPD terkait.

2.5.3 Usulan Masyarakat yang telah diverifikasi melalui SIPD RI yang disesuaikan dengan pembidangan urusan dan target Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berjumlah 102 dengan Kamus Usulan Usulan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa ada 25 Usulan dan Fasilitasi Pembangunan Gedung Posyandu sebanyak 77 Usulan yaitu dengan rincian yang statusnya diproses sebanyak 3 Usulan, di kembalikan 47 Usulan dan yang tolak 52

Usulan, adapun rincian dan penjelesan terkait masing-masing usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	35 Pcs	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
2	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	35 Pcs	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai

3	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
4	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
5	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	5 Unit	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
6	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai

7	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tennis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
8	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.12 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
9	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Karya RT 02 Kel, Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan tidak spesifik, Untuk Fasilitas Meja dan Kursi Rapat terfasilitasi Pada Tahun Anggaran 2024

10	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
11	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Bukit Samboja indah RT 07 Kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

12	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Galendrong Dook RT 24 Kel Muara Jawa Ulu 0°49'27.73"S 117°12'41.29"E, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
13	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

14	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° PI KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	<p>Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>
15	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Jalan Ahmad sifa RT.13 Kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	<p>Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>

16	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Jalan Ahmad Sifa RT. 13 kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>Usulan Belum menjadi Program Priotas DPMD Tahun 2025</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD
18	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

19	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Bunga Tanjung) RT 011, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
20	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Teratai Putih, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

21	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pembangunan Gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Teratai Putih RT 005, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
22	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 03 Sungai Seluang, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

23	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>jl Karya jaya RT 04 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

24	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl Karya jaya posyandu AB 1 RT 04 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
25	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 03 Sungai Seluang, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

26	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Posyandu AB 2 dan AB 3 kel Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

27	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Posyandu AB 2 dan AB 3 kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

28	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD
29	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3,Usila kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD

30	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 001 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
31	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

32	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.01 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
33	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan dan Permasalahan tidak sinkron

34	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	18 Unit	<p>Usulan Belum menjadi Program Priotas DPMD Tahun 2025</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------

35	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 3, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
36	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	9 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

37	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
38	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor lurah wonotirto jl karya RT 03 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Fasilitasi Kantor Lurah Bukan menjadi Tusi DPMD

39	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Lurah Wonotirto Jl Karya Rt 03 Kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Fasilitasi Kantor Lurah Bukan menjadi Tusi DPMD
40	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor kelurahan Wonotirto Jl karya Rt 04 kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
41	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor kelurahan wonotirto Jl karya Rt 03 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024

42	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Muai RT 09, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Menjadi Prioritas DPMD Tahun 2025
43	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-Handil II RT 06 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

44	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-handil II Perum pemedas RT 08 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
45	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sambera Baru	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Sudah terfasilitasi Tahun Anggaran 2024
46	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Karya RT 02 Kel, Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan Tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumentasi dll

47	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Utara RT.001 Desa Tanah Datar, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Tidak dilengkapi dengan Dokumen Status Lahan
48	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi

49	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Bukit samboja indah RT 07 Kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan tidak di lengkapi, Proposal dan Lokasi
50	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 004 Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun III	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi

51	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2022, Lengkapi Dokumen Status Lahan
52	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° PI KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2022, Lengkapi Dokumen Status Lahan

53	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa RT.13 Kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Proposal yang disampaikan belum bertanda tangan, dan Lengkapi Dokumentasi
54	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl.Habib Tunggang Parangan RT. 003 Selingsing, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Pembangunan Gedung Sekolah bukan menjadi Tusinya DPMD

55	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya RT 04 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD
56	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya posyandu AB 1 RT 04 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD dan tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumen dll

57	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Posyandu AB 2 dan AB 3 kel Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD dan tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumen dll</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

58	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	
59	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 17 (0°52'39"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi

60	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Gedung Posyandu Balita (Posyandu bahagia 1 s.d. 6), Posbindu, dan Posyandu Lansia Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi
61	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 20 (0°52'12"S 117°12'40"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi

62	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 19 (0°52'19"S 117°13'35"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi
63	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Kantor kelurahan wonotirto Jl karya Rt 03 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Fasilitasi Sarana Kantor Lurah tidak ada cantolah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada DPMD

64	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal yang telah bertanda tangan, Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi, dan Titik Koordinat Lokasi
65	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan pemuda RT 007 Desa Sebulu ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan

66	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl Habib Tunggang Parangan Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2023, Lengkapi Dokumen Status Lahan
67	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl.Habib Tunggang Parangan Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan sama atau terdoble

68	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-Handil II RT 06 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Permasalahan dan Usulan Perlu disinkronkan
69	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD

70	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Desa Kelekat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	<p>Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------

71	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu Cempaka, Dusun Sidomakmur, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
72	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	JL. KENANGA RT.04, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Lepu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan

73	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Kampung Lama RT.12, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan
74	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Kampung Lama RT.008, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan

75	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Jl. Ulin, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ulu</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>1 Unit</p>	<p>Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan</p>
76	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Loa Tebu RT .12, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	<p>1 Unit</p>	<p>Usulan Belum dilengkapi dengan Proposal yang berisikan Usulan Pembangunan, Dokumen Status Lahan, dan Dokumentasi</p>

77	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Kelurahan Jahab RT 16, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Belum di lengkapi Proposall, Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi dll
78	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Loa Tebu RT . 18, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sinkron

79	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Loa Tebu RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Bukan Menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
80	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	DUSUN AJJALANG RT 011 DESA SANTAN ILIR, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Lengkapi Dokumen Status Lahan

81	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	DUSUN MATTIEO WALI RT 004 DESA SANTAN ILIR, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Lengkapi Dokumen Status Lahan
82	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Tabang Lama	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal dan Dokumentasi

83	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Tidak dilengkapi Proposal, Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi Lokasi
84	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan yang disampaikan di Proposal tidak Spesifik

85	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Dusun sari mulya B , Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	<p>Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>
86	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Dusun ajjalang, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	<p>Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun</p>

87	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Dusun mattiro wali rt 004, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan
88	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</p>	<p>Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang</p>	<p>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</p>		Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD

89	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD
90	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Semangko Jl. Syamsuddin. HA RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024

91	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan
92	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Loa Duri Ilir RT.5, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

93	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Muara Muntai Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
94	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa loa duri ilir Dusun putak, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
95	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan Tanah

96	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Muara Leka, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
97	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
98	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

99	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
100	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Lamin Pulut RT, 001, Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

101	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Loa sakoh RT.003 JLn.pusban, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
102	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Handil Tiga RT.03, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Usulan dengan Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa

gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2021-2026 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa

Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan

mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan

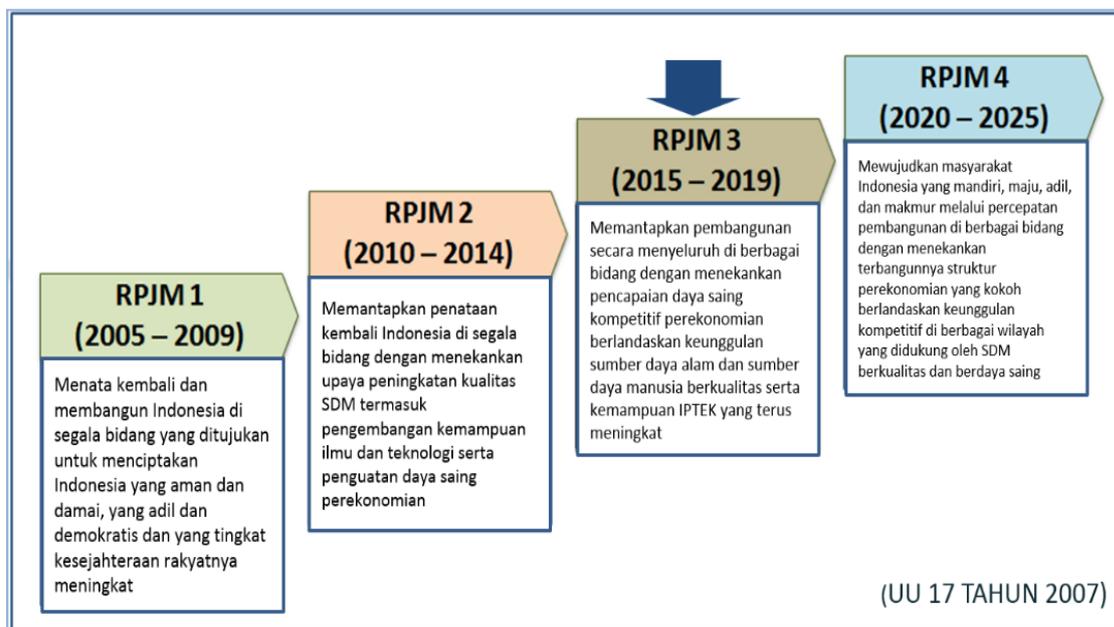
kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Berdasarkan RPJPN dan RPJM yang telah dirumuskan bahwa salah satu yang menjadi kebijakan penting berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu Penangan Stunting dimana masalah stunting merupakan Isu Nasional dimana Daerah harus menyusun perencanaan dan arah kebijakan pada Perangkat Daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan Perangkat Daerah yang

diamanahi untuk menyusun Program Kegiatan yang mengarah pada Penurunan Angka Stunting.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :



Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, RENSTRA OPD serta Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan RPJMN 3 dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

TABEL 3.1
HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Gender 2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 3. Peningkatan investasi sektor UMKM 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga 5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 6. Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru 7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 8. Peningkatan ekspor produk olahan 9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi 12. Peningkatan infrastruktur pertanian 13. Peningkatan produktivitas pertanian 14. Perbaikan tata niaga produk pangan 15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 16. Peningkatan rasio elektrifikasi 17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan maloy, kawasan industry lainnya dan pusat pertumbuhan.

		19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
2	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan. 3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 6. Penegakan hukum lingkungan 7. Penurunan emisi gas rumah kaca <p>Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah</p>
3	Politik	-
4	Hukum	-
5	Pertahanan dan Keamanan	-
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
7	Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi
8	Kewilayahan	-

9	Kelautan	-

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, dan sarana prasarana desa
			2. Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki	1. Meningkatkan Kerjasama Desa berbasis Kawasan Pertanian dalam arti luas 2. Mengidentifikasi kawasan perdesaan berbasis potensi komoditas unggulan desa
			3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Memperkuat kapasitas fiskal desa dengan mengoptimalkan specific grant (bantuan keuangan khusus) kepada desa 3. Membentuk gugus tugas pendamping desa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan/teknis 4. Mendorong BUMDesa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat (Pertanian, air bersih, dan listrik desa dll)
			4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa/Kelurahan	1. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Optimalisasi Peran RT melalui pengalokasian 50 juta rupiah per RT 3. Mendorong Ekonomi Masyarakat dengan menggali potensi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Mengembangkan semangat Gotong Royong dan Tetap Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

TABEL 3.2

SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan
			Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN**

Rencana kerja Program dan kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan dengan analisis kebutuhan dan pertimbangan kebijakana sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun 2025 adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menterjemahkan dan mengimplementasik Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan beberapa pertimbangan rumusan antara lain : pencapaian target kinerja perangkat yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama), IKK (Indikator Kinerja Kunci), Indikator Program dan Kegiatan, yang tentunya mengarah kepada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu : Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Akselerasi dan Transpormasin Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
- b. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah terdiri dari 8 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan , Program Penataan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Program Kerjasama Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Dimana jumlah keseluruhan Program Kegiatan pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2025 yaitu 5 Program, 12 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.

- c. Rumusan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2025 sesuai dengan yang termuat pada Renstra 2021-2026 DPMD baik itu terkait dengan rumusan indikator, target serta pagu indikatif sudah sesuai berdasarkan rumusan yang ada pada Renstra.
- d. Adapun Rumusan terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2														
2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								65.329.407.818					25.314.210.893
2	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA								19.405.789.448			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85 Nilai	17.673.125.065
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								1.000.000.000			Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	849.894.400

2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong, Samarinda	84 Nilai	5 Dokumen	100 Persen	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	449.894.400
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	3 Laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

RENCANA KERJA | 2025

2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	400.000.000
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Data	100 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Berita Acara	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14.105.338.976			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.390.280.193

2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	2142 Orang/Bulan	12 Laporan	13.855.338.976	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	400.000.000
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								105.000.000			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	48.000.000

2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.000.000
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							318.000.000			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	250.000.000	
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	112 Paket	20 Persen	168.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0

2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	84 Nilai	60 Orang	20 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							574.000.000			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Persen	631.500.000	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Paket	23 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	250.000.000
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Paket	23 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.000.000
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	3 Dokumen	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	14 Laporan	23 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000

2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	200 Dokumen	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186 Dokumen	0
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	4 Dokumen	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	157.500.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	150.000.000
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	6 Unit	100 Persen	2.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	5 Unit	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	1.203.450.472

2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.000.000
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	12 Laporan	23 Persen	903.450.472	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.450.472
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							200.000.000			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	150.000.000	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	6 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000

2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	25 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	65 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	50.000.000
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	1 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	82 Nilai	1 Unit	82 Nilai	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA							1.850.000.000			Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86 Persen	370.000.000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							1.850.000.000			Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	28 Desa	370.000.000	

2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	25,91 Persen	7 Desa	27 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Fasilitas Pembentukan Desa	1 Desa	120.000.000
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Sidomulyo(Anggana),Semayang(Kenohan),Loleng (Kota Bangun),Sumber Sari(Kota Bangun Darat),Salo Palai(Muara Badak),Perangat Baru(Marang kayu),Gunung Sari(Tabang),Lebaho Ulaq(Muara Kaman),Selorong(Sebulu),Bukit Pariaman(Tgr Seberang),Muara Leka(Muara Muntai),Lek Mantan(Muara Wis),Sepakat(Loa Kulu)	25,91 Persen	13 Desa	27 Desa	1.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	2 Desa	0
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Karyajaya,Kutai Lama,Bakungan,Kedang Ipil,Rebaq Rinding,Sungai Bawang,Semangko,Muara Pedohon,Lamin Pulut,Hambau,Bunga Jadi,Lekaq	25,91 Persen	18 Desa	27 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	10 Desa	100.000.000

2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Muara Badak: Saliki, Salo Palai, Muara Badak Ulu, Muara Badak Ilir, Tanjung Limau, Tanah Datar, Badak Baru, Suka Damai, Gas Alam Badak I, Batu-Batu, Badak Mekar, Salo Cella, Sungai Bawang, Kec. Marangkayu: Perangat Baru, Bunga Putih, Semangko, Prangat Baru, Prangat Selatan, Kersik, Santan Ulu, Santan Tengah, Santan Ilir, Makarti, Sebuntal, Kec. Samboja: Karya Jaya, Bukit Raya, Beringin Agung	100 Persen	7 Dokumen	57 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9 Dokumen	250.000.000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan Kec. Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Ponoragan, Rempanga, Margahayu,	100 Persen	4 Dokumen	57 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000

									Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kec. Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kec. Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir.									
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tgr Seberang:Separi,Kerta Buana,Bukit Pariaman,Buana Jaya, Suka Maju, Kec. Loa Kulu:Desa Loh Sumber,.Jembayan Tengah, Sumber Sari,Ponoragan,Sepakat, Rempanga, Kec. Sebulu: Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari,Kec. Muara	100 Porsen	7 Dokumen	57 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	250.000.000

2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	110 Dokumen	193 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	1 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	90 Persen 10 Persen	389 Dokumen	193 Desa	7.885.720.910	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	50 Dokumen	100.000.000

2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	72 Orang	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	2.716.085.828
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang: Ds.Muara Salung Kec. Kenohan:Ds. Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Ds.Se dulang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun:Ds. Loleng,Pela, Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu:Ds.Jembayan Ilir Kec. Muara Badak:Ds. Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	90 Persen 10 Persen	15 Dokumen	193 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Desa	90 Persen 10 Persen	25 Dokumen	193 Desa	1.100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11 Dokumen	100.000.000

2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec.Muara Muntai: Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pulau Harapan,Jan tur,Ma.Muntai Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq; Kec.Loa Kulu: Sepakt, Jongkang, Sumber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Pon oragan,Rem panga,Jonggon Jaya,Lung Anai; Kec.Loa Janan: Batuh,Bakungan, Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajaya, Tani Bhakti,Loa Duri Ilir; Kec.Anggana: Ma.Pantuan,Tani Baru,Sungai Mariam,Sidomulyo,Handil Terusan; Kec.Ma.Badak: Ma.Badak Ulu,Gas Alam Badak I,Badak Baru,Saliki,Salo Palai,Tanah Datar,Batu-Batu; Kec.Tgr: Bendang Raya; Kec.Sebulu: Sebulu Ilir,Giri Agung,Mekar Jaya,Sebulu Ulu,Sebulu Modern,Sele	90 Persen 10 Persen	111 Laporan	193 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0
---	----	----	------	------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------	----------	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---

									Bhuana Jaya, Embalut, Bukit raya, Kertaburana, Separi, Bukit Pariaman, Perjiwa, Tik Dalam, Loa Lepu, Suka Maju, Loa Pari; Kec. Marang Kayu : Kersik, Prangat Baru, Sambera Baru, Perangat Selatan, Santan Ulu, Bunga Putih, Semangko; Kec. Ma. Wis : Enggelam, Lebak Mantan									
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang: Long Lalang, Umaq Dian, Bila Talang, Kampung Baru, Umaq Bekuay, Muara Salung Kec. Kenohan: Kahala, Teluk Bingkai, Kahala Ilir, Tubuhan Kec. Kota Bangun Darat. Sedulang, Kota Bangun III, Sumber Sari Kec. Kota Bangun. Loleng, Pelan, Sebelimbingan Kec. Loa Janan: Loa Duri Seberang Kec. Loa	90 Persen 10 Persen	24 Laporan	193 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	100.000.000	

									Kulu: Ds.Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau, Muara Badak Ulu									
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kabupaten Kutai Kartanegara	90 Persen 10 Persen	16 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	3 Dokumen	193 Desa	12.258.472.960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen 10 Persen	2 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	25 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	83 Orang	193 Desa	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	28 Orang	120.000.000

2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tabang, Tenggara	90 Persen 10 Persen	19 Desa	193 Desa	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000	
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong, Samarinda	90 Persen 10 Persen	19 Laporan	193 Desa	382.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	100.000.000	
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	1 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	100.000.000	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggara	90 Persen 10 Persen	387 Dokumen	193 Desa	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	100.000.000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	70,35 Persen 100 Persen	2.165.000.000	
													19.346.924.500						

2	13	05	2.01		Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota							19.346.924.500			Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	827 Lemba ga	2.165.000.000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarak atan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventaris asi Masyarakat at Hukum Adat	Persentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang: Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Salung, Muara Kebaq, Muara Tuboq	64,07 Persen 100 Persen	6 Dokumen	824 Lembag a	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokume n	100.000.000

2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong, Samarinda, Kec. Sebulu: Selerong, Kec. Loa Kulu: Jonggong Desa, Kec. Kota Bangun: Sebelimbing, Lolong, Kec. Kota Bangun Darat: Kota Bangun I, Wonosari, Kec. Muara Kaman: Mena mang Kanan, Mena mang Kiri, Kupang Baru, Bukit Jering, Liang Buaya, Kec. Tabang: Long Lalang, Kampung Baru, Umaq Tukung, Buluqsen, Tabang Lama, Kec. Marangkayu: Bunga Putih, Kec. Muara Wis: Muara Enggelam, Kec. Anggana: Tani Baru	64,07 Persen 100 Persen	40 Dokumen	824 Lembaga	690.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen	150.000.000
---	----	----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------	-------------	-------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------

2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	64,07 Persen 100 Persen	4430 Lembaga	824 Lembaga	3.050.453.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630 Lembaga	125.000.000
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Muara Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Muara Badak, Marangkayu	64,07 Persen 100 Persen	540 Unit	824 Lembaga	11.013.111.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Unit	120.000.000

2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Posyandu Aktif Persentase Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Desa Selerong, Batu Batu, Beringin Agung, Tani Bakti, Panca Jaya, Long Beleh Modang, Purwajaya, Sebulu Modern, Bila Talang, Umaq Bekuay, Beloro, Sungai Payang, Tani Bakti, Manunggal Jaya, Santan Ilir, Sidomulyo, Tabang Lama, Bukit Jering, Liang Buaya	100 Persen 57,79 Persen	51 Dokumen	824 Lembaga	650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	500.000.000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Posyandu Aktif Persentase Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Prov. Kalimantan Timur, Surabaya	100 Persen 57,79 Persen	1 Laporan	824 Lembaga	643.360.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	750.000.000
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	100 Persen 57,79 Persen	4 Laporan	824 Lembaga	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.000.000

RENCANA KERJA | 2025

2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	100 Persen 57,79 Persen	1 Dokumen	824 Lembaga	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen 57,79 Persen	53 Dokumen	824 Lembaga	2.650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	245.000.000

BAB V**P E N U T U P**

Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2025 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

e. CATATAN PENTING

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun melalui Renja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga beberapa pointer catatan penting yaitu :

1. Dalam proses penyusunan Renja OPD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat grass root. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara waktu pelaksanaan Musrenbangdes dengan Musrenbang Kecamatan.
2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi simultan antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun.
3. Menciptakan good and clean goverment dengan melakukan langkah-langkah penciptan legalitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dinaungi oleh payung atau produk hukum.

b. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

2. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Rencana Kerja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

c. TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya. Diantaranya adalah :

1. Menjaga konsistensi Aparatur dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah maupun Program Prioritas dan program Dedikasi guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja OPD;

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada OPD;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang lain dalam pelaksanaan Program Kegiatan Lintas Perangkat Daerah guna menghindari friksi-friksi dan miss comunication dalam lingkungan OPD serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Melakukan pressure (tekanan) terhadap Pemerintah Desa khususnya dalam memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dan BUMDes dan BUMDesma dalam upaya pengembangan Ekonomi Unggulan Desa, dan Kerjasama Desa. untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga hasilnya mampu mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Rencana Kerja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2024





KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Gedung E Lantai 1 Kode Pos 75511, Telp. 0541-661832,
email: dinas.pmd.kukar@gmail.com